

BAB III

PEMIKIRAN POLITIK M. AMIEN RAIS

Menelusuri akar gagasan politik M. Amien Rais, tidaklah terlalu mudah. Bukan saja karena keterlibatannya dalam posisi elit kepemimpinan Muhammadiyah dan ICMI pusat, tetapi juga disebabkan tidak banyaknya karya tulis yang disusunnya secara khusus mengenai wacana tersebut. Namun, bukan berarti gagasannya itu tidak dapat diungkap, walaupun masih memerlukan waktu yang panjang dalam perkembangan pemikiran dan kepemimpinan M. Amien Rais terutama dalam Muhammadiyah beberapa tahun mendatang.

Salah satu kelebihan M. Amien Rais, baik selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah maupun selaku cendekiawan bebas adalah kemampuan mengemas pemikirannya yang tajam dan mendalam dengan bahasa yang sederhana dan lugas. Dengan demikian apa yang hendak disampaikan dapat dibaca dan dipahami dengan mudah, tidak berliku-liku. Kalaupun harus bermetafora maka pilihan permissalannya pun sederhana dan mengena.

Yang perlu diperhatikan dari pemikiran M. Amien Rais adalah adanya titik kesamaan dengan pola pikir Ali Shariati. Ciri khas tulisan dan ceramah-ceramahnya adalah "menggerakkan". Shariati memang seorang cendekiawan

sekaligus ulama Islam yang tidak suka melihat *status quo*, kemandekan, dan kejumudan. (M. Amien Rais, 1982:IX). Hal tersebut kalau dibandingkan dengan ide-ide pemikiran M. Amien Rais akan searah dan *compatible*. Ide suksesi misalnya, adalah salah satu contoh dari sikap tegasnya menolak kekuasaan yang cenderung mempertahankan *status quo*.

Mengingat posisi dan situasi yang demikian, maka penulis akan mencoba mengemukakan beberapa nuansa pemikiran politik M. Amien Rais, baik dari sudut pandang politik maupun agama.

A. Tauhid Dan konsepsi Umat.

Perkataan "tauhid", sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi setiap muslim. Kata-kata itu merupakan kata benda kerja (*verbal noun*) aktif (yakni, memerlukan pelengkap penderita atau obyek), sebuah derivasi atau tashrif dari kata-kata *wahid* yang artinya "satu" atau "esa." Maka makna harfiah *tauhid* ialah "menyatukan" atau "mengesakan". (Nurcholish Madjid, 1992:72).

Ketika Islam dipancangkan sebagai agama yang mengatur aspek spiritual sebagaimana agama-agama yang lain, tauhid sering dipahami sebagai "keeseaan Tuhan", sebagai argumentasi tandingan atas konsep trinitas dalam

agama kristen. Persepsi semacam ini tidak hanya parsial, tapi juga salah. Makna tauhid bukan hanya bermakna *transcendental*. Dalam kehidupan sosial muslim, pandangan dunia tauhid digambarkan oleh Toshio Kuroda, sebagaimana dikutip oleh Kazuo Shimogaki dalam *Kiri Islam*-nya :

"Dalam tauhid secara logis dapat ditarik pengertian bahwa penciptaan Tuhan adalah esa. Ia menolak segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, kelas, garis keturunan, kekayaan dan kekuasaan. Ia menempatkan manusia dalam kesamaan. Ia juga menyatukan antara manusia dan alam yang melingkupi penciptaan Tuhan... Keesaan Tuhan berarti keesaan kehidupan, yakni tidak ada pemisahan antara spiritualitas dan kewadagan, antara keagamaan dan keduniawian". (Kazuo Shimogaki, 1988: 18-19).

Analisa tersebut meng-*klarifikasi*-kan bahwa Islam mencakup bidang-bidang keduniawian, mental dan sekaligus ketuhanan. Seorang muslim harus bisa "memainkan" fungsi tauhid. Bagaimana tauhid itu berfungsi di dalam pemikiran muslim, dalam lembaga-lembaga sosial politik (islam) dan lain sebagainya.

Lebih jauh, formulasi paling pendek dari tauhid, menurut M. Amien Rais, adalah kalimat *thaiyyibah* : *la ilaha illa Allah*, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Dengan mengatakan "tidak ada Tuhan selain Allah", seorang manusia tauhid memutlakkan Allah Yang Maha Esa sebagai *Khalig* atau Maha Pencipta, dan menisbikan selain-Nya sebagai makhluk atau ciptaan-Nya. Karena itu, hubungan

manusia dengan Allah tak setara dibandingkan hubungannya dengan sesama makhluk. Tauhid berarti komitmen manusia kepada Allah sebagai fokus dari seluruh rasa hormat, rasa syukur, dan sebagai satu-satunya sumber nilai. apa yang dikendaki oleh Allah akan menjadi sumber nilai (*value*) bagi manusia tauhid, dan tidak akan mau menerima otoritas dan petunjuk kecuali dari Allah. (M.amien Rais, 1991:13).

Dari sini nampak, bahwa M. amien rais menempatkan tauhid sebagai yang paling sentral dan esensial. Dengan berpegang pada nilai-nilai ketauhidan, manusia muslim tidak akan terombang-ambing oleh ketidakpastian. Seorang yang bertauhid, yang dengan bebas mampu menentukan sendiri pandangan dan jalan hidupnya menurut pertimbangan akal sehat dan secara jujur mengatakan tentang apa yang benar dan salah, yang baik dan buruk, akan tampil sebagai seorang yang berani, penuh percaya diri, dan berkepribadian kuat, karena ia tidak terkungkung oleh keangkuhan dirinya dan tidak menjadi tawanan egonya. Ia berani mengatakan tentang apa yang sebenarnya. Dalam diri manusia yang bertauhid tersebut, ada semacam nilai kontrol yang nilai tersebut bermuara dari al Qur'an.

Sehingga sangat tepat terhadap apa yang diungkap oleh M. Amien Rais, bahwa agama (islam) merupakan sumber etika. "etika yang dilepaskan dari sumbernya akan menjadi

situasional eticks dimana patokan-patokan yang baik dan buruk sangat relatif, berganti-ganti sesuai dengan tuntutan situasi." (M.Amien Rais, 1985: XV).

Dalam perspektif ini, Soedjatmoko -sebagaimana dikutip oleh Syafi'i Ma'arif- juga memberikan paparan yang tidak jauh beda dengan M. amien Rais. Ia melihat, bahwa agama adalah sebagai suatu yang amat diperlukan, terutama untuk "memperbaiki keretakan antara etika dan kebijakan tanpa membuka pintu bagi penyalahgunaan agama demi maksud-maksud politik." (A. Syafi'i Ma'arif, 1997:72).

Kutipan berikut akan memperjelas visi Soedjatmoko tentang peran dan fungsi agama dalam kehidupan bersama, terutama tentang politik;

"Agama harus menjanjikan struktur makna yang jangkauannya melampaui politik tetapi toh terkait dengan kenyataan yang ada. agama harus mengaitkan tanggung jawab etis dan tujuan-tujuan moral dengan peran aktif dalam proses penentuan sejarah. Agama harus mengajarkan cara berfikir dan jiwa yang penuh kerendahan hati yang amat diperlukan didalam zaman yang ditandai dengan perubahan-perubahan yang pesat dan tak terduga." (A. Syafi'i Ma'arif, 1997:72).

Artinya kitab suci ini (al Qur'an), pada hakekatnya adalah sebuah dokumen agamis dan etik yang punya tujuan praktis bagi penciptaan sebuah masyarakat yang baik dan adil secara moral. Masyarakat tipe ini haruslah terdiri dari manusia yang saleh secara agama dengan kesadaran

yang tajam dan kuat tentang Allah yang memerintahkan kebaikan dan melarang keburukan. Dalam bahasa yang populer dikalangan Muhammadiyah adalah prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*.

Secara lebih luas, makna tauhid juga berarti suatu pembebasan. Bebas dari belenggu kemungkaran dan kemunafikan. Ketika manusia sudah berikrar bahwa "tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah rasul-Nya", maka ia sudah terikat dengan norma-norma islam. Maka dengan sendirinya ia akan terbebas dari persoalan-persoalan yang dilarang oleh agama (Islam).

Sedang makna tauhid menurut M. Amien Rais mengandung makna menegasikan otoritas selain dari Tuhan (Allah). Ini berarti merupakan kalimat pembebasan bagi manusia, dan manusia tauhid mempunyai *tahrirun nas min 'ibadatil 'ibad ila 'ibadatillah* yaitu membebaskan manusia dari menyembah sesama manusia kepada menyembah Allah semata. (M. Amien Rais, 1991: 13-14).

Dalam kehidupan sehari-hari, sering dijumpai sementara masyarakat ataupun seorang muslim dalam melakukan aktifitasnya dibayang-bayangi oleh rasa takut kepada sesama manusia karena mungkin yang ditakuti itu sebagai atasannya dalam suatu lembaga atau institusi. Dan rasa takut tersebut disebabkan oleh rasa kekhawatiran

dipecat atau diturunkan dari jabatan. Bahkan mungkin mereka takut menyampaikan atau mengoreksi kekeliruan atas penyimpangan yang dilakukan oleh atasan maupun pemimpinnya.

Manusia semacam ini, sesungguhnya belumlah memahami makna tauhid yang semestinya, sehingga mereka sebenarnya masih belum merdeka dan masih belum menyadari status manusiawinya. Disinilah letak kemunduran kebanyakan masyarakat muslim dewasa ini, dan memang keterbelakangan yang diderita oleh masyarakat muslim dalam segala aspek kehidupan sesungguhnya berakar pada kemerosotan tauhid, sehingga pemahaman tentang tauhid perlu dipertegas dan diluruskan.

Tauhid, sebenarnya merupakan sumber nilai-nilai falsafah dan etik. Nilai-nilai yang dimaksudkan ialah nilai-nilai seperti kebenaran, keadilan, kasih sayang, kesabaran, kebaikan, keindahan, dan sebagainya. Ini adalah nilai-nilai yang kekal, abadi dan tak berubah. seorang muslim mesti membuktikan kesetiaan pada nilai-nilai ini karena kesetiaan pada nilai-nilai ini bermakna kesetiaan kepada Allah. (Chandra Muzafar, 1989:19).

Gerak pembebasan, merupakan prinsip utama tauhid dari pemikiran M. Amien Rais. Pembebasan yang dimaksudkan ialah pembebasan seluruh manusia dari segala kesulitan

dan hambatan merealisasikan dirinya sebagai muslim dalam suatu tata kehidupan sosial islami sebagai prasyarat tercapainya keadilan sosial dan persamaan hak untuk mencapai tujuan akhir, yaitu diterimanya penyerahan kepada pencipta (Allah) atau *mardhotillah* dan kebahagiaan hidup dunia dan ukhrowi. Untuk mencapai ini, tandas M. Amien Rais, seorang muslim harus melakukan rekonstruksi kehidupan masyarakat, termasuk negara. (Abdul Munir Mulhan, 1994: 98-99).

Restrukturisasi tata kehidupan masyarakat dan juga negara yang dimaksud M. Amien Rais adalah suatu kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara adil, merata dan berkesinambungan. Dan untuk mewujudkan ini, umat Islam harus berjuang melalui jalur politik yakni dengan jalan Islamisasi lewat jalur kekuasaan atau elit politik.

Fenomena ketidakadilan dan sulitnya mencari nilai-nilai keadilan yang cukup dirasakan oleh masyarakat yang bernegara, mendorong M. Amien Rais untuk menampilkan wajah Islam yang sejak diturunkan telah menawarkan konsep-konsep keadilan. Dalam perkembangan masyarakat sekarang ini, keadilan telah menjadi tuntutan bagi masyarakat yang terus berdinamika. Al Qur'an dengan tegas menyeru kepada individu atau sekelompok komunitas untuk menegakkan tata kehidupan sosial yang adil. Ini dapat

dilihat dalam al Qur'an surat al Maidah ayat 8, yaitu :

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ
لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

"Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kelompok (kaum), mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat dengan taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Departemen Agama RI, 1984: 159).

Pandangan hidup manusia tauhid dalam bermasyarakat, berbangsa dan berpemerintahan sesuai dengan kehendak Allah, yakni mengejar nilai-nilai utama dan tegaknya keadilan sosial sebagaimana prinsip universalisme Islam, ini terlihat dalam konseptualisasi M. Amien Rais mengenai tauhid yang meliputi enam kesatuan prinsipil, yaitu; kesatuan penciptaan (*unity of creation*), kesatuan kemanusiaan (*unity of mankind*), kesatuan tuntunan hidup (*unity of guidance*), kesatuan tujuan hidup (*unity of purpose of life*), kesatuan ketuhanan (*unity of godhead*), kesatuan seluruh alam semesta (*unity of the whole universe*). (M. Amien Rais, 1991: 18).

Konseptualisasi tauhid, diistilahkannya sebagai tauhid sosial. Sementara dalam ilmu kalam, yakni pembahasan tentang teologi (ketuhanan), para ulama

membedakan tauhid menjadi dua macam, yaitu *tauhid ilmy* (ilmu tauhid murni) dan *tauhid goshdy* (tauhid terapan). *Tauhid ilmy* membahas tentang sifat-sifat Tuhan, keesaan-Nya, keagungan-Nya, yang semuanya hanya Esa bagi Dia. Karenanya seorang *muwahid* yang murni, dalam meninjau hubungan antara makhluk dan sang Khaliq adalah khusus, bersifat murni dan tidak dapat dicampuri unsur-unsur apapun. Dan tauhid sosial dalam pengertian umum sama dengan *tauhid ilmy*. Perbedaannya hanya dalam sikap dan perilaku. Sehingga terminologi tauhid sosial adalah dimensi sosial dari tauhidullah. (M. Amien Rais, 1997: 11).

Apabila konsep tersebut ditarik dalam realitas kehidupan masyarakat, maka seorang yang mempunyai dimensi tauhid sosial, cara berfikirnya, cara berperilakunya, mengacu pada kehidupan Rasulullah Saw. Sebagai seorang yang bertauhid sempurna, beliau bersikap keras, tidak kenal kompromi dalam hal-hal *faksvaa wal munkar*, namun senantiasa kasih sayang terhadap sesamanya. Sebagaimana termaktup dalam Q.S al Fath ayat 29;

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا .

"Muhammad itu adalah utusan Allah. orang-orang yang bersamanya (mukmin) sangat keras pada orang-orang kafir, berkasih sayang sesama mereka, engkau lihat mereka rukuk, sujud serta mengharap kurnia dari Allah dan keridhaan-Nya." (Departemen agama RI, 1984: 567).

Tanggung jawab manusia tauhid menurutnya, mempunyai dua dimensi, yaitu hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan dan hubungan horisontal dengan sesama manusia dan dengan alam semesta. (M. Amien Rais, 1991:15). Hubungan-hubungan tersebut harus sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak ini memberikan visi kepada manusia tauhid untuk membentuk suatu masyarakat yang mengejar nilai-nilai utama dan tegaknya keadilan sosial. Hal ini sesuai dengan pandangan A. Rahma Zainuddin, bahwa tauhid adalah proses pembebasan manusia yang mencakup segala hubungan yang ada (hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dan dengan alam semesta) dengan mendapatkan unsur transendensinya berdasar kaidah-kaidah yang telah ditentukan Tuhan. (Budhi Munawar Rahman, 1995:430).

Dan untuk mewujudkan kehendak Allah tersebut, manusia tauhid dituntut untuk mengadakan serangkaian tindakan mengubah dunia dan masyarakat di sekelilingnya. Tindakan tersebut dalam bahasa Muhammadiyah dinamakan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Konsep tauhid dalam pemikiran M. Amien Rais, pada dasarnya adalah menekankan pandangannya pada integralisasi berbagai aspek kehidupan dalam konteks tauhid. Integralisasi yang dimaksudkan ialah bahwa tauhid harus menjiwai dan mewarnai seluruh bidang kehidupan kaum muslimin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun politik.

Dalam pandangan Kuntowijoyo, konsep integralisasi tauhid mempunyai makna, bahwa Islam menjadikan tauhid sebagai pusat dari semua orientasi nilai, sementara pada saat yang sama melihat manusia sebagai tujuan dari transformasi nilai. Dan dalam konteks inilah Islam itu disebut sebagai *rahmatan lil'alam*. rahmat untuk seluruh alam semesta, termasuk untuk kemanusiaan. (Kuntowijoyo, 1993: 167).

Karena itu, kewajiban paling utama dalam hidup bertauhid adalah menghambakan diri hanya kepada Allah, mengharap keridhoan-Nya, yang diawali dengan aslama yaitu menyerahkan diri, tunduk, dan patuh secara total hanya pada Allah. Dan setiap muslim hanya mendasarkan segala tingkah lakunya mengacu pada tauhid dan tiap perbuatannya tidak akan menyimpang dari kaidah-kaidah tauhid.

B. Demokrasi Islam.

Dilihat dari basis empiriknya, agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia. Dengan demikian agama dan demokrasi memiliki dialektika tersendiri. Namun walaupun demikian, bukan berarti keduanya tidak tidak bisa dipadukan. Memang secara eksplisit, al Qur'an tidak menyebutkan tentang adanya konsep demokrasi dalam membentuk suatu tatanan bernegara. Tapi setidaknya secara implisit hal itu ada tercerminkan dalam al Qur'an.

Wahyu Allah yang berupa al Qur'an, mengandung nilai-nilai yang mendorong demokrasi, seperti nilai persamaan hak, bahwa yang paling baik adalah yang paling bertaqwa. Begitu pula ayat tentang syura (musyawarah). Kandungan nilai ajaran-ajaran agama ini jelas mendukung demokrasi. Nilai Islam yang sangat menjunjung demokrasi adalah nilai persamaan hak, yang menyatakan bahwa diantara sesama manusia tidak ada perbedaan, kecuali tingkat ketaqwaan. (Aswab Mahasin, 1993:33).

Pengertian demokrasi bukan hanya sekedar *the goverment from the people by the people and for the people*, tapi lebih luas juga menyangkut masalah-masalah keadilan, partisipasi dalam mengambil keputusan,

penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, dan sebagainya. Intinya, kedaulatan penuh ada ditangan rakyat, bukan ditangan penguasa. Ini sangat beda jauh dengan pandangan al Maududi, bahwa "kedaulatan rakyat" merupakan dasar dari negara sekuler. (Abul A'la al Maududi, 1990: 282). Ia tidak menerima bahwa kedaulatan terletak pada rakyat, tapi kedaulatan mutlak di tangan Tuhan.

Argumen tersebut ada benarnya, ketika dimasukkan dalam kerangka negara Islam, tapi bila negara tersebut majemuk, dengan berbagai macam suku, agama, dan ras, konsep tersebut tampaknya sulit untuk dapat direalisasikan. Dan perlu digaris bawahi, bahwa bentuk demokrasi yang "tepat" itu tergantung pada penalaran, bersifat situasional, dan dipengaruhi oleh faktor kebudayaan. Oleh karena itu, tak ada kesamaan bentuk demokrasi di dunia ini. (Aswab Mahasin, 1993: 30). Demokrasi yang dipakai di negeri ini (Indonesia) misalnya -konon- tidak ada padanannya di luar negeri, sehingga ada yang mengatakan demokrasi Indonesia ini sebagai demokrasi yang unik.

Demokrasi Islam, sangat beda jauh dengan demokrasi Barat. Demokrasi Islam berdasar syari'ah dan moral sementara demokrasi Barat berdasar pada kehendak suara

mayoritas. Syari'ah sangatlah luhur, baik untuk dunia maupun untuk akherat. Bagi M. Amien Rais, demokrasi merupakan alat perjuangan politik umat Islam untuk membangun masyarakat yang lebih baik. (M. Amien Rais, 1996: 4). Tentunya harus sesuai dengan norma-norma al Qur'an. Umat Islam hanya bisa aman untuk membangun masa depannya kalau lewat demokrasi *an sich*.

High politics, merupakan perwujudan dari gagasannya tentang perjuangan politik umat Islam lewat demokrasi. Artinya umat Islam harus menampilkan nilai demokrasi dengan memakai politik yang adi luhung jika memang harus berpolitik, sesuai dengan nafas al Qur'an yang merupakan sumber etik.

Berikut akan penulis paparkan mengenai gagasan politik M. Amien Rais yaitu tentang konsep *high politics* dan maksud dari demokratisasi.

1. High Politics Dan Demokratisasi.

Ide *high politics*, muncul untuk kali pertama dilontarkan oleh M. Amien Rais yang waktu itu menjabat sebagai Pjs Ketua PP Muhammadiyah (sekarang resmi menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah) dalam saresahan pra muktamar ke 43 Muhammadiyah di Malang. Mengutip dari apa yang dilontarkan oleh M. Amien Rais yang dimuat di Majalah

Amanah no. 221, sebagai berikut :

"Muhammadiyah harus melakukan *high politics* (politik tinggi) yang berarti bergerak dikawasan moral dan etika politik. Ini sebagai konsekwensi kepemilikan obligasi moral Muhammadiyah yang menuntut *concern* terhadap kepentingan bangsa yang lebih luas. Kita jangan sampai terperangkap pada *low politik* (politik rendah) seperti mengejar kursi di DPR, titip-titip orang ke orsospol dan sebagainya." (Amanah, 1995: 19).

Prinsip-prinsip ajaran sosial politik Islam menurutnya, seperti: persamaan (musawah), persaudaraan (ukhuwah), musyawarah, keterbukaan, pertanggungjawaban (mas'uliyah), amanah, dan sebagainya perlu ditafsirkan secara kreatif. (M. amien Rais, 1990: 100). Barangkali konsep *high politics* adalah formulasi kreatif dari M. Amien Rais tentang prinsip-prinsip ajaran sosial politik Islam, yang itu ia gali dari kandungan-kandungan al Qur'an yang menurutnya merupakan sumber etik.

Dalam cakrawala yang lebih luas makna *high politics* dapat dianalogkan sebagai sebuah organisasi atau seseorang yang menunjukkan sikap yang tegas terhadap korupsi, mengajak masyarakat luas untuk memerangi ketidakadilan, menghimbau pemerintah untuk terus menggelindingkan proses demokratisasi dan keterbukaan, maka organisasi atau orang tersebut sedang memainkan *high politics*.

Akan tetapi, bila sebuah organisasi melakukan gerakan dan manuver politik untuk memperebutkan kursi

DPR, minta bagian di lembaga eksekutif, membuat *pressure group*, membangun lobi serta kasak-kusuk untuk mempertahankan atau memperluas *vested interests*, maka organisasi atau orang tersebut sedang melakukan *low politics*.

Kedua konsep tersebut - *high politics* dan *low politics* - setidaknya tidaknya memberikan isyarat pada semua pelaku politik baik yang langsung maupun tidak, untuk bisa menelaah terhadap perkembangan fenomena yang telah terjadi. Dua gagasan tersebut secara tidak langsung mendorong untuk melakukan kerja-kerja politik dalam kaidah-kaidah yang islami, dalam bahasa yang sering dipakai Muhammadiyah, lebih mengacu pada konsep *amar ma'ruf nahi munkar*.

Pada hakekatnya segenap masyarakat menyetujui himbauan-himbauan politik yang berdimensi moral dan etis sebagaimana yang dimaksudkan dalam pemahaman *high politics* tersebut. Sehingga dengan demikian *high politics* muatannya tidak lain adalah nilai-nilai luhur, moral dan etis.

Ada kemungkinan pendekatan moral itu justru akan populer, karena isu tentang pemerintahan yang bersih sekarang ini lagi hangat. A. Dahlan Ranuwiharjo, dalam sebuah orasinya menyatakan kembali perlunya moral dalam

urusan politik. Atau lebih tepatnya lagi, diperlukan peresapan etik dan moral dalam politik. (A. Dahlan Ranuwiharjo, 1996: 3).

Tema *high politics*, yang diartikannya sebagai politik luhur, dapat dihubungkan dengan pemahaman keagamaannya mengenai tauhid, sehingga *high politics* merupakan formula mengenai etika keagamaan yang ditempatkan sebagai basis politik kelembagaan, sistem maupun perilaku. Gagasannya mengenai suksesi, merupakan konsekwensi logis dari *high politics*-nya tersebut.

Sesuai pandangan keagamaannya - yang mereduksi pada konsep tauhidnya -, M. Amien Rais menyebutkan tiga ciri minimal *high politics*. Pertama, politik sebagai amanah dan konsep keagamaan. Kedua, kesadaran akan tanggung jawab politik. Dan yang ke tiga, keterkaitan politik dengan prinsip ukhuwah yang melampaui batas etnik, ras, agama dan status sosial-ekonomi-budaya. Sejauh mana ciri-ciri ini dapat direalisasi dalam kehidupan politik obyektif, baginya, merupakan kondisi yang diperlukan bagi pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*. (A. Munir Mulhan, 1995: 4).

Disinilah barangkali kunci pemikiran politik M. Amien Rais khususnya jika dikaitkan dengan praktek politik dan bagaimana mengembangkan suatu mekanisme

demokrasi. Lebih khusus lagi akan berkaitan dengan bagaimana menjalankan suatu kehidupan yang demokratis atau menjalankan aspek demokratisasi. Seluruhnya bersumber pada gagasannya mengenai agama sebagai pembentuk tata kemasyarakatan, sekaligus sebagai kerangka analisis kemasyarakatan tersebut.

Willy Eichler - seperti yang dikutip Nurcholish Madjid - melihat, bahwa demokrasi itu identik dengan demokratisasi. Yang penting adalah dalam suatu masyarakat atau negara terdapat proses terus menerus secara dinamis, dalam gerak perkembangan dan pertumbuhan ke arah yang lebih baik. Cukuplah masyarakat disebut demokratis selama ia bergerak tanpa henti menuju kepada yang lebih baik. (Nurcholis Madjid, 1997: 210).

Islam dewasa ini - dalam potret Indonesia - meskipun dalam kadar serta intensitas tertentu belum berhasil, sedang berada di tengah arus demokratisasi (lihat fenomena ICMI dan "wajah" kabinet menteri). Umumnya, skenarionya terdiri dari dua hal. Pertama, demokratisasi dari atas yang merupakan kesepakatan dari kelompok-kelompok ditingkat elite penguasa politik. Kedua, demokratisasi dari bawah yang berasal dari dorongan masyarakat yang menghendaki reformasi politik.

Gagasan tentang perlunya representasi umat dalam pemerintahan dan legislatif, kata M. Amien Rais tidak bertentangan dengan konsep *high politics* yang dilontarkannya. *High politics*, tandasnya, muatannya moral dan etis. (M. Amien Rais, 1996: 5).

Gerakan sosio-moral Islam memang memerlukan kekuasaan politik, sebab tanpa itu pembumian pesan-pesan kemanusiannya akan mengawang. Doktrin tentang *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan asas dari sebuah bangunan kekuasaan. (A. Syafi'i Ma'ari, 1995: 67). Dan yang perlu digaris bawahi, bahwa kekuasaan atau kedaulatan dalam Islam semata-mata bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip moral yang diakui bersama. Adapun politik yang semata-mata untuk mempertahankan *status quo* kekuasaan yang korup tidak diragukan lagi merupakan perbuatan yang a-moral dari sisi pandangan Islam. Namun, Amien Rais yakin, bahwa *status quo* kalau dipertahankan akan membuat negara (Indonesia) lebih *bonyok* dan busuk. (M. Amien Rais, 1996: 4).

Tapi terlepas dari itu, demokratisasi sekarang ini memang harus menjadi "ideologi" siapa pun, dan di belahan bumi manapun untuk menggiring rezim yang tidak demokratis menjadi demokratis. Untuk itu sekarang ini demokrasi harus menjadi kesadaran bagi elite penguasa. Karena kalau

tidak, ia akan dipaksa oleh keadaan atau gerakan massa yang besar.

Masih dalam kerangka *high politics*, tiga ciri atau prinsip bagi terselenggaranya *high politics* mengandung considerans, yaitu sejauh mana *high politics* tersebut dapat direalisasikan pada tataran yang lebih praktis. Hal ini memang sangat penting, karena merupakan kondisi yang diperlukan bagi pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*, sebagaimana yang dimaksudkan dalam al Qur'an surat al-Hajj ayat 41 :

الَّذِينَ مَكَنْتُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

"Mereka adalah orang-orang yang Kami beri kekuasaan yang teguh di muka bumi, niscaya menegakkan sholat, membayar zakat, dan menyuruh (manusia) berbuat kebaikan serta mencegah kejahatan. Dan kepada Allah-lah kembalinya segala urusan". (Departemen Agama RI, 1984: 518).

Dengan demikian konsep M. Amien Rais mengenai *high politics* sejalan dengan pesan kitab suci yang didalamnya mengandung nilai-nilai etika dan moralitas. Nilai etikanya sudah jelas yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*, yang berlaku bagi individu maupun sekelompok masyarakat. Sehingga tidak diragukan lagi ungkapan Fazlur Rahman,

bahwa tujuan sentral al Qur'an adalah untuk menciptakan sebuah tata sosial yang mantap dan hidup di muka bumi, yang adil dan diasaskan pada etika. (A. Syafi'i Ma'arif, 1995: 64).

Sebagai ungkapan akhir tentang demokrasi menurut M. Amien Rais adalah, bahwa tidak ada pertentangan sedikitpun antara proses demokratisasi dengan ajaran-ajaran Islam. Ia percaya 100 per sen pada demokrasi karena demokrasi itu memang sejajar dengan ajaran moral dan etika Islam.

Adapun untuk mewujudkan demokrasi itu, harus melewati beberapa langkah. Pertama, lewat pendidikan politik pada rakyat. Kedua, penguasa harus diyakinkan bahwa hanya mereka yang memiliki legitimasi atau keabsahan yang kuat. Ketiga, peran kaum intelektual di dalam memasyarakatkan gagasan-gagasan demokrasi. (M. Amien Rais, 1996: 4).

2. Nilai-Nilai Politik Yang Harus Ditegakkan.

Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa dalam Islam tidak mengenal adanya pemisahan antara bidang yang satu dengan yang lainnya. Satu sama lainnya saling berhubungan, bahkan saling melengkapi. Al Qur'an, menurut M. Amien Rais, mengandung nilai-nilai politik atau

prinsip-prinsip konstitusional yang harus ditegakkan dan dijadikan pilar-pilar pengelolaan suatu pemerintahan (negara), yaitu *syura*, keadilan, kebebasan/kemerdekaan, persamaan, dan pertanggungjawaban penguasa dihadapan rakyat. (M. Amien Rais, 1991: 55).

Membincang tentang variable-variable diatas, otomatis akan terkait dengan keberadaan suatu negara. Agama tanpa negara akan sulit dicari perkembangannya, demikian pula negara tanpa agama, akan menjadikan negara itu berjalan tanpa kontrol dan cenderung atheis. Agama dapat berperan sebagai *moral force* supaya orang berbuat baik.

Nilai-nilai politik dalam al Qur'an, sebagaimana digambarkan oleh M. Amien Rais, mengindikasikan bahwa Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia. Islam sebagai agama wahyu memberikan etik yang cukup jelas bagi pengelolaan seluruh kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara dan berpemerintahan. Adapun konsep tentang negara, Islam tidak menyebutkan secara detil. Konsep terinci secara detil sepenuhnya diserahkan kepada kaum muslimin untuk menemukannya berdasarkan *ijtihad* mereka. Islam hanya memberikan etika dasar, nilai-nilai dan norma-norma yang harus ditegakkan, prinsip-prinsip umum dan referensi baku. Justru disinilah letak keabadian

al Qur'an. yaitu menyerahkan urusan detil kepada muslimin.

Dalam kitab suci dijelaskan, bahwa tujuan para rasul Allah ialah mewujudkan masyarakat yang berketuhanan, yaitu masyarakat yang para anggotanya dijiwai oleh semangat mencapai ridho Allah, melalui perbuatan baik bagi sesamanya dan kepada seluruh makhluk. Inilah dasar pandangan etis kaum beriman. (Nurcholis Madjid, 1995: 476).

Pada intinya, seorang muslim tidak harus buta atau benci pada politik. Kegiatan politik harus menjadi kegiatan integral dari kehidupannya yang utuh. Kehidupan dunia harus "direbut" dan dikendalikan agar sesuai dengan ajaran Islam. Nabi Muhammad berkontemplasi di Gua Hira' hanya menjelang kenabiannya saja. Dimasa-masa selanjutnya beliau terjun ke arena kegiatan dunia.

Akhirnya, kelima nilai politik atau prinsip konstitusional diatas, harus dijadikan pedoman dalam membangun suatu negara yang penuh ridho Allah. Syari'ah tidak berbicara mendetil mengenai aspek-aspek kelembagaan, teknik dan prosedur pengelolaan suatu negara, agar umat Islam secara cerdas dan kreatif dapat merumuskan keperluannya sendiri sesuai dengan perkembangan zaman. (M. Amien Rais, 1991:56).

Sebagai bahan *considerans*, perlu kiranya diperhatikan tentang teori-teori politik yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh Islam abad pertengahan sampai abad 19 dan 20, semisal Ibnu Taimiyah ataupun Abul A'la Al Maududi yang banyak menegakkan pilar-pilar politik dengan *mainstream* al Qur'an dan As Sunnah. Adalah bermanfaat untuk mengadakan perbandingan antara pemikiran-pemikiran yang berpangkal pada satu sumber (al Qur'an dan as Sunnah) ini, perbandingan ini akan memperkaya Khazanah intelektual muslim.

Teori politik Abul A'la Al Maududi -sebagaimana M. Amien Rais meletakkan pandangannya pada postulat-postulat Qur'ani. Iman terhadap keesaan dan kekuasaan Allah merupakan landasan sistem sosial dan moral yang ditanamkan oleh para Rosul. Dari sinilah filsafat politik Islam mengambil titik pijak. Dan nama yang tepat untuk politik Islam adalah "kerajaan Tuhan" yang dalam bahasa politik disebut teokrasi. Oleh karena itu, ia dalam melihat demokrasi tidak sebagaimana tokoh-tokoh yang lain. Dalam Islam, menurutnya kedaulatan tertinggi ada pada ditangan Tuhan. Hal itu memunculkan teori kekhalifahan yang pada akhirnya mengejawantah dengan terbentuknya negara Islam.

Akan halnya dengan Ibnu Taimiyah, teori-teori

politiknya banyak menekankan pada berdirinya suatu pemerintahan. Praktek pengukuhan sebuah pemerintahan harus dianggap sebagai tugas agama yang mesti dipatuhi setiap muslim disamping sebagai sarana agar manusia lebih berkesempatan mendekatkan diri kepada Allah. (Khalid Ibrahim Jindan, 1995: 46).

Kedua tokoh tersebut -sebagaimana halnya dengan M. Amien Rais- menggunakan agama (Islam) sebagai paradigma. Cuma yang perlu digarisbawahi, kedua tokoh diatas mempunyai teori-teori politik yang sudah terbakukan. Akan halnya dengan M. Amien Rais, pemikiran-pemikirannya masih dalam gagasan idial yang perlu aplikasi lebih lanjut. Dan itu merupakan cita-cita ideal dari sebuah konsep pemikiran.

C. Politik Dan Dakwah.

Meskipun diakui adanya perbedaan antara keduanya, dan seringkali memunculkan berbagai kontrofers dalam penafsirannya, namun tidak bisa dipungkiri adanya titik temu yang menghubungkan "budaya" Islam secara universal. Salah satu titik temu itu berupa komitmen masing-masing variable tersebut (politik dan dakwah) pada kewajiban menjalankan setiap usaha untuk menciptakan masyarakat yang sebaik-baiknya di muka bumi (lih. Q.S. 3:104).

Didalam ajaran Islam tidak ada pemisahan antara dakwah dan politik. Bahkan kegiatan dibidang pendidikan, sosial dan ekonomi tetap terkait dengan politik. Sebab Nabi Muhammad sendiri selain politikus juga pedagang dan juru dakwah. Ketiga hal tersebut menyatu dalam diri nabi, tapi dalam menjalankan misinya bisa dipisahkan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Secara teoritik, dapat dibedakan antara kehidupan-kehidupan politik, ekonomi, budaya, sosial, hukum, dan lain sebagainya, tetapi dalam realitasnya, kehidupan-kehidupan tersebut menyatu bulat menjadi suatu kesatuan. Oleh karena itu, tandas M. Amien Rais, kita jangan sampai terjebak dalam sebuah pemikiran seolah-olah berbagai bidang kehidupan itu terpisah satu sama lainnya. (M. Amien Rais, 1995: 99-100). Politik yang dijalankan oleh seorang muslim, sekaligus yang berfungsi sebagai alat dakwah, sudah tentu bukanlah politik sekuler, melainkan politik yang penuh komitmen kepada Allah SWT. (M. Amien Rais, 1991: 29).

Dimata wahyu, kegiatan politik haruslah diorientasikan kepada tujuan-tujuan dakwah. Berpandu kepada tujuan-tujuan dakwah inilah yang dapat menolong politik agar tidak terlepas dari bingkai cita-cita moral. (A. Syafi'i Ma'arif, 1995: 115). Belajar dari kasus

sejarah politik Islam yang jauh dari nilai-nilai etika Islam. Kasus tentang konflik Umayyah - abasiyah, Sunni - Syia'ah, dan banyak lagi contoh yang lain, dengan segala trauma dan dosa-dosa sejarah yang ditinggalkannya, adalah indikator dari terlepasnya politik dari tujuan-tujuan dakwah.

Untuk mencapai tujuan-tujuan politik, para politisi di dunia Islam sering terlepas dari tujuan-tujuan dakwah, yaitu tercapainya sebuah masyarakat dunia yang bermoral dengan landasan wahyu. Bila dalam peradaban barat Tuhan telah di bunuh, di dunia Islam Tuhan telah "dipaksa" untuk berpihak pada kelompok-kelompok politik tertentu dengan kompetisi yang tidak sehat. Karena itu, seorang pelaku politik (Islam) tidak harus meninggalkan nilai-nilai Islam dalam menjalankan misinya. Ia harus membawa serta ajaran-ajaran yang terkandung dalam al Qur'an, sebagaimana ungkapan *hudan lil nas* atau ungkapan *hudan lil muttagin* adalah diantara bukti bahwa al Qur'an menawarkan dirinya secara fungsional untuk memimpin manusia secara moral kearah jalan yang lurus dan benar.

Dalam cakrawala pemikiran M. Amien Rais dapat dibaca, bahwa antara dakwah dan politik sesungguhnya mempunyai suatu hubungan organis dan fungsional, karena

dalam banyak hal, kelancaran dakwah banyak ditentukan oleh mekanisme politik yang ada. (Kuntowijoyo, dkk., 1995: 75).

Pandangan tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa kegiatan dakwah dalam Islam pada esensinya meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Karena *amar ma'ruf nahi munkar*, sebagaimana disebutkan dalam al Qur'an tertuju pada seluruh bidang kehidupan, dan para pendukung (pelaku) dakwah juga menggunakan segenap jalur bidang kehidupan. Secara demikian, kegiatan budaya, sosial, ekonomi, ilmu dan teknologi maupun politik dapat dijadikan sebagai kegiatan dakwah. Tapi Dawam Rahardjo menegaskan, bahwa hal itu tidak berarti setiap kegiatan "pembangunan" dapat disebut dakwah. (M. Dawam Rahardjo, 1993: 160).

High politics, berarti telah menyinggung ranah dakwah. Karena dakwah menurutnya adalah sebagaimana yang ada dalam al Qur'an, yaitu dakwah ila Allah, ila al janah yang berinti pada *amar ma'ruf nahi munkar*, termasuk juga dalam pengertian sosial reconstruction dan bersifat multidimensional. (M. Amien Rais, 1993: 3). Seseorang yang menunjukkan sikap tegas pada hal-hal yang munkar (ketidakadilan, kolusi, korupsi, dan lain-lain), maka ia sedang melakukan *high politics*.

Yang perlu digaris bawahi dari pemikiran M. Amien Rais - tentang dakwah dan politik - bahwa ia tetap menjadikan tauhid sebagai sebuah paradigma. Dengan perkataan lain, bahwa dakwah yang bersendikan tauhid selalu selalu berusaha memasyarakatkan Islam sebagai pandangan hidup dan pemecah setiap masalah yang timbul. Pandangan hidup tauhid tidak mempertentangkan antara dunia dan akherat, antara yang imanen dan transenden, berhubung seluruh alam semesta dilihat sebagai satu kesatuan (unity of the whole universe).

D. Politik Sebagai Alat Dakwah.

Salah satu pemikiran M. Amin Rais terhadap politik adalah memberikan muatan positif terhadap makna politik yaitu menempatkan politik sebagai alat dbkwah. Dengan sendirinya aturan permainan yang mesti ditaati juga harus paralel dengan aturan permainan dakwah. Aturan-aturan permainan itu sesungguhnya adalah refleksi dari moralitas dan etika yang lebih dalam.

Terhadap aturan permainan politik ini, M. Amien Rais memberikan suatu permisalan bahwa politik bisa jadi alat dakwah manakala memenuhi beberapa ciri, yaitu : tidak boleh menggunakan paksaan atau kekerasan, tidak boleh menyesatkan, tidak boleh menjungkirbalikkan

kebenaran, dan juga tidak diijinkan menggunakan induksi-induksi psikotropik yang mengelabui masyarakat. (M. Amien Rais, 1991: 28). Selain itu, keterbukaan, kejujuran, rasa tanggung jawab, serta kebenaran menyatakan yang benar sebagai benar dan yang bathil sebagai bathil, harus menjadi pilar utama bagi berlangsungnya suatu politik yang berfungsi sebagai sarana dakwah.

Politik yang memiliki ciri-ciri tersebut niscaya fungsional terhadap tujuan dakwah. Politik yang fungsional terhadap tujuan dakwah adalah politik yang sepenuhnya mengindahkan nilai-nilai Islam. Bukan politik yang menganut faham sekulerisme yang sudah jelas menjadi politik tanpa dasar-dasar moral keagamaan, dan nilai-nilai yang berlaku didalamnya sangat relatif dan situasional. Politik semacam ini akan sering bertabrakan dengan tujuan dakwah.

Dalam pandangan Islam, politik hanyalah salah satu medium terpenting untuk mencapai tujuan dakwah; jadi bukan sebaliknya, dakwah dijadikan medium untuk mencapai tujuan politik, yaitu politik yang terlepas dari kendali moral. Bila ini yang berlaku, maka dapat dikatakan bahwa politik telah "memperkosakan" agama dari tercapainya tujuan-tujuan dakwah. (A. Syafi'i Ma'arif, 1995: 111).

Islam bukan hanya menghadirkan *postulat-postulat*

teoritis tapi lebih jauh dari itu, agar umat dapat mengimplementasikan dalam tataran yang lebih praktis. Seluruh mekanisme kehidupan muslim harus mengacu pada satu titik fokus yaitu tauhid, karena tauhid menurut M. Amien Rais adalah sumber dari moralitas dan etika. Bila moralitas dan etika dilepaskan dari politik, maka politik itu akan berjalan tanpa arah, dan bermuara pada kesengsaraan orang banyak.

Oleh sebab itu, politik yang dijalankan oleh seorang muslim, sekaligus yang berfungsi sebagai alat dakwah, adalah suatu pekerjaan yang penuh komitmen pada Allah. Karena politik, bagaimanapun ia didefinisikan tetap menyangkut kekuasaan dan cara penggunaan kekuasaan. Apa yang namanya kekuasaan, pengaruh, kepentingan-kepentingan tertentu, posisi politik, dan sebagainya, bukanlah tujuan politik. Semua itu merupakan sarana atau tujuan untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya, yaitu pengabdian kepada Allah. Ini sesuai dengan ikrar seorang muslim bahwa seluruh aspek hidup dan kehidupan hanyalah diabdikan kepada Allah SWT. (lih. Q.S. al-Al'am: 162).

Maka dari itu bagi seorang muslim, suatu tindakan politik dianggap baik, kalau tindakan tersebut berguna bagi seluruh rakyat sesuai dengan ajaran *rahmatan lil*

'alamin dan politik sebagai alat dakwah harus menunjang rekontruksi masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Rekontruksi masyarakat itu dapat dilakukan lewat segala bidang kehidupan, termasuk melalui jalur politik.